**PERAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PENYEBARAN *HOAX* DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Leatris Jojano, Antonius Boham, Nicolas Mandey

Program Studi Ilmu Komunikasi

Universitas Sam Ratulangi Manado,Jln. Kampus Bahu, 95115, Indonesia

Email : leatrisjojano97@gmail.com

**ABSTRAK**

**Penyebaran *hoax* selama beberapa dekade terakhir ini terus mengalami peningkatan. Penyebaran *hoax* tersebut tidak hanya membodohi masyarakat dengan sajian informasi yang tidak benar, namun hal tersebut juga dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menghasut dan memecah belah masyarakat dan pada gilirannya akan membahayakan persatuan bangsa. Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat multikultural sangat rentan terhadap gesekan apabila isu-isu sensitif yang terindikasi *hoax* masif dihadirkan di ruang publik. Masifnya penyebaran *hoax* saat ini sangat dimungkinkan seiring ketersediaan media teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju pesat. *Hoax* semakin mendapatkan tempatnya melalui kehadiran berbagai media *online* dan media sosial sehingga memungkinkan penyebarannya sulit dikendalikan. Terlebih banyak masyarakat kita yang mudah menyebarkan informasi yang diperolehnya tanpa melalui klarifikasi terhadap kebenaran berita yang beredar tersebut. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran komunikasi dari pemerintah dalam mengatasi penyebaran hoax yang ada di kabupaten Hamahera Utara, penyebaran hoax perlu diberantas karena dapat membawa dampak pembohongan dan kebodohan bagi masyarakat, untuk itu perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah pendekatan-pendekatan komunikasi dalam rangka memberikan informasi yang benar tentang hoax dan juga memberikan pendidikan tentang bagaimana informasi yang benar dan terpercaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan sumber data utama adalah informan penelitian yaitu pemerintah daerah. Hasilnya peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi masalah hoax karena dapat memberikan informasi yang baik, benar serta terpercaya kepada masyarakat.**

**Kata kunci : Peran, Komunikasi Pemerintah Daerah, Mengatasi Penyebaran *Hoax***

*ABSTRACT*

*The spread of hoaxes over the last few decades has continued to increase. The spread of hoaxes is not only fooling the public by presenting untrue information, but it is also used by certain parties to incite and divide society and in turn will endanger national unity. Indonesia as a country that has a multicultural society is very vulnerable to friction if sensitive issues indicated by massive hoaxes are presented in the public space. The massive spread of hoaxes is currently very possible along with the availability of information and communication technology media that is increasingly advancing rapidly. Hoax is increasingly gaining its place through the presence of various online media and social media, making it difficult to control its spread. Moreover, many of our people easily spread the information they get without going through the clarification of the truth of the circulating news. This study discusses how the role of communication from the government in overcoming the spread of hoaxes in North Hamahera district, the spread of hoaxes needs to be eradicated because it can have an impact on lying and stupidity for the community, for that there needs to be government intervention in overcoming this problem. Various efforts have been made by the government, one of which is communication approaches in order to provide correct information about hoaxes and also provide education about how to provide correct and reliable information. This research was conducted using qualitative methods by utilizing the main data source is research informants, namely local governments. As a result, the government's role is very important in overcoming the hoax problem because it can provide good, correct and reliable information to the public.*

*Keywords: Role, Local Government Communication, Overcoming the Spread of Hoax*

**PENDAHULUAN**

P

enyebaran *hoax* selama beberapa dekade terakhir ini terus mengalami peningkatan. Penyebaran *hoax* tersebut tidak hanya membodohi masyarakat dengan sajian informasi yang tidak benar, namun hal tersebut juga dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menghasut dan memecah belah masyarakat dan pada gilirannya akan membahayakan persatuan bangsa. Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat multikultural sangat rentan terhadap gesekan apabila isu-isu sensitif yang terindikasi *hoax* masif dihadirkan di ruang publik. Masifnya penyebaran *hoax* saat ini sangat dimungkinkan seiring ketersediaan media teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju pesat. *Hoax* semakin mendapatkan tempatnya melalui kehadiran berbagai media *online* dan media sosial sehingga memungkinkan penyebarannya sulit dikendalikan. Terlebih banyak masyarakat kita yang mudah menyebarkan informasi yang diperolehnya tanpa melalui klarifikasi terhadap kebenaran berita yang beredar tersebut. Ditambah lagi, koneksi jaringan internet yang hampir menjangkau seluruh wilayah Indonesia memungkinkan media *online* dan media sosial dapat dengan mudah diakses melalui *smartphone* dan aplikasi seluler sehingga setiap orang dapat dengan cepat mengikuti perkembangan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia. Menurut riset *platform* manajemen media sosial *Hoot Suite* dan agensi marketing sosial *We Are Social* bertajuk "*Global Digital Reports* *2020*", hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Riset yang dirilis pada akhir Januari 2020 itu menyebutkan, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 160 juta, meningkat 8,1 persen atau 12 juta pengguna dibandingkan tahun 2019. Dengan begitu, penetrasi penggunaan media sosial di Indonesia sudah mencapai 59 persen dari total jumlah penduduk (Kumparan Tech, 12 Februari 2020). Penetrasi pengguna media sosial yang meningkat, kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta keterlibatan publik melalui media *online* dan jejaring sosial memunculkan konsekuensi yang juga wajib diwaspadai. Dalam artian bahwa kemudahan-kemudahan tersebut tidak lepas dari penetrasi *hoax* karena informasi yang diperoleh melalui media *online* atau jejaring sosial sebagian besar dapat diandalkan namun sulit diverifikasi. Informasi yang tidak terverifikasi jika telah disebarkan akan sulit diperbaiki. Kemampuannya untuk memutarbalikan kebenaran menjadi ancaman serius pada stabilitas negara. Penyebaran *hoax* di Halmahera Utara berdasarkan data Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian pada tahun 2019 paling banyak melalui aplikasi chatting yaitu 70%, media sosial 60% dan situs web sebanyak 10%. Ragam *hoax* yang disebarkan mulai dari bidang politik 9 kasus, kesehatan 10 kasus, dan SARA 2 kasus. Selama tahun 2020, informasi yang berisi konten *hoax* di Halmahera Utara mengalami peningkatan terutama pada bidang kesehatan mencapai 21%, politik 10%, dan SARA 3%. Peningkatan *hoax* di bidang kesehatan lebih berkaitan dengan mewabahnya virus Corona (Covid-19) di Indonesia sejak awal tahun 2020. Penyebaran informasi *hoax* yang berkaitan dengan wabah Virus Covid-19 banyak menimbulkan kegaduhan dan keresahan dikalangan masyarakat. Salah satu dari sekian informasi *hoax* yang paling menghebohkan yaitu beredarnya video *hoax* pada tanggal 26 Maret 2020. Video ini mengunggah seorang bayi yang dapat berbicara dan meminta ibunya merebus telur dan harus dikonsumsi bersama anggota keluarganya pada malam itu juga sebagai obat penangkal covid-19. Akibat dari informasi *hoax* ini, masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Utara terbangun pada waktu tengah malam, membangunkan anggota keluarganya, tetangga bahkan pemilik toko/kios yang menjual telur kemudian telur-telur tersebut direbus dan dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarganya pada malam itu juga. Informasi *Hoax* lainnya tekait vaksin covid-19 yaitu isu penanaman chip atau komponen manajemen sistem yang bisa melacak masyarakat yang telah menerima vaksin. Informasi *hoax* ini mengakibatkan banyak masyarakat menjadi ragu dan takut untuk divaksin. Pemerintah Daerah Halmahera Utara yang merupakan unsur penyelenggara pemerintah di daerah seyogyanya terus tanggap terhadap kemungkinan dampak sosial yang ditimbulkan dari penyebaran *hoax*. Sejarah kelam konflik horizontal akibat isu SARA yang pernah terjadi pada penghujung tahun 1999 hendaknya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan semua lapisan masyarakat untuk tetap waspada, bahwa informasi *hoax* yang penyebarannya tidak terkendali bisa berdampak pada stabilitas keamanan di daerah ini. Mengantisipasi potensi merusak dari dampak buruk *hoax* , maka peran pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam upaya pencegahan penyebarluasan *hoax* melalui langkah-langkah yang konstruktif dan proaktif. Keberhasilan upaya pencegahan penyebaran *hoax* di Kabupaten Halmahera Utara sangat ditentukan oleh kebijakan komunikasi pemerintah Halmahera Utara itu sendiri. Menurut Beach *dalam* Silalahi (2004) bahwa bagaimanapun juga organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa komunikasi. Salah satu kunci demi terciptanya kelancaran upaya pencegahan penyebaran informasi *hoax* di masyarakat adalah peran komunikasi pemerintahan di antara para pemangku kepentingan. Apabila komunikasi pemerintah tidak berjalan dengan baik maka upaya pencegahan penyebar *hoax* yang diharapkan akan banyak mengalami hambatan atau kendala. Untuk itu, dalam rangka meminimalisir penyebaran *hoax* di masyarakat, pemerintah daerah harus meningkatkan efektivitas komunikasinya terutama di internal organisasi pemerintah daerah maupun dengan masyarakat agar memiliki kesamaan cara pandang dan penyelesaian dalam menyikapi *hoax* yang beredar di masyarakat. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peran komunikasi Pemerintah Daerah dalam mengatasi penyebaran *hoax* di Kabupaten Halmahera Utara?” Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana peran komunikasi pemerintah daerah dalam mengatasi penyebaran *hoax* di Kabupaten Halmahera Utara.

**METODOLOGI PENELITIAN**

M

etode Penelitian; Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran komunikasi Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam mengatasi penyebaran *hoax.* Metode kualitatif menurut Ibrahim (2015:52) adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan kata lain, metode kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Tujuan utama penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017:23) adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada objek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik.Dengan metode ini peneliti berharap dapat memperoleh data-data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Fokus Penelitian; Dalam penelitian ini difokuskan pada: Peran Komunikasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Dalam Mengatasi Penyebaran *Hoax,* dengan demikian fokus ini dilihat berdasarkan konsep Komunikasi Pemerintahan Buluamang dan Handika ( 2018:59) adalah: Proses berbagi informasi, ide, gagasan atau perasaan, sikap. Informan penelitian; Informan penelitian yang dimaksud adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Halut: 1 orang, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian: 1 orang, Kepala bidang pengelolaan opini aspirasi publik dan layanan hubungan media: 1 orang, Kepala bidang layanan infrastruktur dasar data center: 1 orang, Kepala seksi pelayanan pengembangan data center:1 orang. Teknik Pengumpulan Data; Observasi. Observasi merupakan teknik yang banyak dilakukan oleh peneliti untuk mengamati secara langsung objek atau kenyataan yang di teliti untuk memperoleh informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti. Wawancara; Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif sehingga peneliti dapat memperoleh data dengan cara menanyakan secara langsung kepada informan dalam penelitian ini. Dokumentasi; Teknik dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan berbagai arsip, dokumen, dan gambar yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian yang ada pada lokasi penelitian. Analisis Data; Analisis data kualitatif menurut Ibrahim (2015:107) adalah keseluruhan upaya sistematis yang dilakukan oleh peneliti dalam memahami data dan menemukan maknanya yang sistematis pula, rasional dan argumentatif, yang mampu menjawab setiap pertanyaan penelitian dengan baik dan jelas, baik pertanyaan kecil (*minor research*) maupun pertanyaan utama (*mayor research*). Menurut Sugiyono (2017 : 131), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dengan demikian, seluruh data yang diperoleh peneliti dari keseluruhan proses pengumpulan data (*data collection*) pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis model interaktif (Model Miles dan Huberman). Aktivitas analisis data model Miles dan Huberman menurut Sugiyono (2020) terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi/penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*). Gambaran tahapan analis data dalam penelitian ini adalah: Reduksi Data (*Data Reduction*). Reduksi data yang dimaksudkan disini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi data. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.

Penyajian Data (*Data Display*). Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data yang substantif dan mana data pendukung. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*). Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

**PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

P

enyebaran informasi hoax menimbulkan keresahan. Untuk itu masyarakat perlu diingatkan agar memanfaatkan media sosial secara positif dan jangan mudah termakan isu tidak benar. "Di Indonesia sudah ada KUHP tentang fitnah dan hasut, serta UU ITE Pasal 28 tentang penyebar berita bohong yang menyesatkan. Dalam bahasa Inggris hoaks diartikan menipu, berita bohong, tipuan, kabar burung, atau berita palsu (Sutantohadi & Wakhidah, 2018). Menurut Firmansyah (2017) dalam mengartikan berita bohong (hoaks) merupakan kesengajaan dalam membuat suatu berita dengan tujuan memperdaya pembaca. Pernyataan lain dari Siswoko (2017) menyatakan bahwa hoaks dikenal juga dengan istilah berita palsu (fake news). Rahadi (2017) menyebutkan bahwa fake news bertujuan untuk memalsukan suatu informasi dan berupaya untuk menggantikan berita yang benar. Dari beberapa pengertian hoaks yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa hoaks adalah berita bohong yang dengan sengaja disebarkan oleh oknum pembuat berita kepada orang lain. Kemunculan hoaks salah satunya disebabkan oleh perubahan dan perkembangan teknologi sehingga membentuk apa yang disebut dengan global village (kampung global), yang telah menciptakan produk berupa media sosial yang memungkinkan jaringan komunikasi yang kian luas dan informasi yang dapat diakses oleh siapapun. Saat ini di dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah “hoax” oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab. Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu, tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi yang rendah akan rentan terpapar berita hoaks. Hal itu ditandai dengan sikap masyarakat yang tidak mempertimbangkan dan memeriksa kebenaran suatu berita. Masyarakat dengan mudahnya menyebarkan suatu berita tanpa mengetahui sumber yang sebenarnya (Maulana, 2017; Witro, 2020). Fenomena di atas jika dibiarkan maka akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Dampak negatif tersebut dapat berupa: (1) Berita hoaks menyebabkan masyarakat sulit mengetahui ketepatan suatu informasi; (2) Terjadi kesalahpahaman hingga merusak kesatuan dan persatuan di antara masyarakat; (3) Berusaha menggiring opini publik yang provokatif sehingga berakibat pada masyarakat; (4) Berita hoaks disebarkan dengan tujuan untuk menjatuhkan salah satu pihak, sehingga menyebabkan adu domba di antara masyarakat; (5) Berita hoaks juga ditujukan untuk menciptakan keresahan publik (Maulana, 2017). Media sosial menjadi salah satu yang digunakan oleh berbagai kalangan. Berbagai informasi bisa dengan mudah didapat melalui media sosial.Hanya dalam hitungan detik, berita apa pun tersebar dan diakses oleh sesama pengguna internet melalui media sosial. Tak jarang berita atau kabar palsu pun tersebar hingga menimbulkan keresahan. Secara umum kita mengenal kabar palsu itu dengan sebutan hoax. Hoax adalah berita bohong yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Terdapat oknum yang sengaja membuat masyarakat resah dan percaya. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, atau Whatsapp adalah tempat dimana gosip, breaking news, dan informasi yang sedang ramai dibicarakan khalayak cepat menyebar. Facebook sendiri memiliki 1,55 milyar pengguna aktif pada 2016, yang setiap penggunanya menghabiskan paling tidak 20 menit per hari untuk membaca informasi terbaru pada lini masa mereka. Lebih jauh, populasi pengguna ini akan terus meningkat, hingga diprediksi pengguna aktif media sosial di seluruh dunia akan mencapai 2,72 milyar pada 2029, sekitar sepertiga dari populasi dunia (Roese, 2018:314). Menjamurnya berita palsu/hoax yang beredar pada media sosial di Indonesia seakan menjadi mata rantai yang tak ada ujungnya. Konten tersebut senantiasa diproduksi, direproduksi, kemudian disebarkan secara terus menerus hingga menjadi sebuah fenomena dan kultur yang biasa saja. Permasalahan ini sejatinya adalah buah dari euforia media berekspresi yang baru, yang memungkinkan kita untuk berujar dan membuat konten apapun tanpa terikat tatanan etika kehidupan yang baku. Seakan kehidupan kita di media sosial berjalan secara terpisah dengan yang kita jalani pada dunia nyata. Permasalahan tentang hoax dampaknya sangat besar pada berbagai sisi kehidupan manusia, salah satunya adalah bisa mengganggu stabilitas negara, karena dengan mendapatkan berita-berita bohong tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius oleh negara dan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pada penelitian ini masalah hoax juga menjadi perhatian utama oleh pemerintah kabupaten Halmahera Utara, yang berupaya berperan dalam mengatasi penyebaran hoax tersebut. dari hasil penelitian mendapatkan bahwa peran pemerintah cukup optimal dalam mengatasi masalah hoax tersebut, hal ini ditandai dengan adanya berbagai Langkah, ide dan gagasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam mengatasi penyebaran berita bohong tersebut, khususnya yang banyak beredar di media sosial. Sesuai dengan tolak ukur yang digunakan dalam penelitian ini guna mengukur peran pemerintah dalam mengatasi masalah hoax dengan acuan beberapa fokus penelitian antara lain adalah bagaimana proses berbagi informasi dalam mengatasi penyebaran Hoax oleh pemerintah Halmahera Utara, bagaimana ide dan gagasan dalam mengatasi penyebaran hoax oleh pemerintah Halmahera Utara, serta bagaimana sikap dari pemerintah Halmahera Utara dalam mengatasi penyebaran hoax tersebut. Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa proses berbagi informasi dalam mengatasi penyebaran Hoax oleh pemerintah kabupaten Halmahera Utara, melakukan berbagai macam pendekatan komunikasi dalam menyampaikan informasi tentang hoax kepada masyarakat melalui berbagai salauran/ media komunikasi, antara lain adalah media massa, koran, televisi, radio, kemudian juga memanfaatkan berbagai plat form media sosial (facebook, Instagram, youtube, website resmi pemerintah, dan lainnya). Disamping itu juga banyak melakukan himbauan kepada ASN dilingkungan pemkab terkait masalah hoax tersebut. Ide-ide dalam mengatasi penyebaran hoax oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, pemerintah berupaya untuk menjalankan secara tegas penegakkan hukum terkait penyebaran-penyebaran berita hoax, dengan menindak tegas secara hukum pelaku yang kedapatan melakukan penyebaran berita bohong, juga merangkul masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam mengontrol penyebaran berita Hoax di media sosial, juga melakukan berbagau upaya edukasi kepada masyarakat tentang literasi media. Gagasan apa yang dibuat oleh pemerintah Halmahera Utara dalam mencegah penyebaran hoax tersebut, berupaya melakukan berbagai cara dalam melawan hoax tersebut, dengan giat menekankan penegakkan hukum terkaik Hoax, juga giat melakukan edukasi kepada masyarakat dalam mencegah hoax, dalam beberapa kegiatan seminar online dan juga melibatkan seluruh element masyarakat dan universitas dalam upaya mencegah penyebaran hoax tersebut. Sikap pemerintah kabupaten Halmahera Utara dalam mengatasi penyebaran hoax, selalu berupaya bersikap tegas dalam memerangi pemberitaan hoax, hal ini dibuktikan dengan menindak sesuai hukum yang berlaku tentang Hoax, selalu melakukan kontroling pada semua media sosial yang ada di Maluku Utara, melalui pemantauan dari dinas infokom setempat, disamping itu pemerintah juga gencar melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang tema-tema literasi media yang baik dan benar. Pemerintah berusaha mengarahkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam melihat berita hoax yang kebanyakan bererdar di media sosial. Secara umum peran pemerintah khususnya kabupaten Halmahera Utara, sangat perhatian dengan masalah penyebaran hoax atau berita bohong tersebut, hal ini di dibuktikan dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam mengatasi penyebaran hoax ditengah masyarakat. Peran pemerintah Halmahera Utara tersebut tentunya merupakan dukungan penuh pada upaya-upaya pemerintah pusat melalui kementrian Infokom dalam mengatasi maraknya hoax di Indonesia.

**KESIMPULAN**

S

ecara umum peran pemerintah khususnya kabupaten Halmahera Utara, sangat perhatian dengan masalah penyebaran hoax atau berita bohong tersebut, hal ini di dibuktikan beberapa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam menangkal penyebaran hoax ditengah masyarakat. Proses berbagi informasi dalam mengatasi penyebaran Hoax oleh pemerintah kabupaten Halmahera Utara, melakukan berbagai macam pendekatan komunikasi dalam menyampaikan informasi tentang hoax kepada masyarakat, pemerintah memanfaatkan berbagai saluran/ media komunikasi, antara lain adalah media massa, koran, televisi, radio juga memanfaatkan berbagai plat form media sosial (facebook, Instagram, youtube, website resmi pemerintah, dan lainnya). Disamping itu juga banyak melakukan himbauan kepada ASN dilingkungan pemkab terkait masalah hoax untuk melanjutkan himbauan kepada masyarakat luas. Ide-ide dalam mengatasi penyebaran hoax oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, pemerintah berupaya untuk menjalankan secara tegas penegakkan hukum terkait penyebaran-penyebaran berita hoax, dengan menindak tegas secara hukum pelaku yang kedapatan melakukan penyebaran berita bohong, juga merangkul masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam mengontrol penyebaran berita Hoax di media sosial, juga melakukan berbagau upaya edukasi kepada masyarakat tentang literasi media. Gagasan pemerintah Halmahera Utara dalam mencegah penyebaran hoax tersebut, berupaya melakukan berbagai cara dalam melawan hoax tersebut, dengan giat menekankan penegakkan hukum terkaik Hoax, juga giat melakukan edukasi kepada masyarakat dalam mencegah hoax, dalam beberapa kegiatan seminar online dan juga melibatkan seluruh element masyarakat dan universitas dalam upaya mencegah penyebaran hoax tersebut. Sikap pemerintah kabupaten Halmahera Utara dalam mengatasi penyebaran hoax, selalu berupaya bersikap tegas dalam memerangi pemberitaan hoax, hal ini dibuktikan dengan menindak sesuai hukum yang berlaku tentang Hoax, selalu melakukan kontroling pada semua media sosial yang ada di Maluku Utara, melalui pemantauan dari dinas infokom setempat, disamping itu pemerintah juga gencar melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang tema-tema literasi media yang baik dan benar. Pemerintah berusaha mengarahkan masyarakat untuk lebih cerdas dalam melihat berita hoax yang kebanyakan bererdar di media sosial. **Saran;** Pemerintah Halmahera Utara perlu secara konsisten dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam upaya mengatasi penyebaran hoax, pemerintah perlu mengoptimalkan semua media komunikasi baik media sosial dan juga media konvensional lainnya seperti koran, radio, televisi. Pemerintah perlu juga menggali ide-ide lainnya dalam terkait dengan upaya pencegahan penyebaran hoax tersebut. Pemerintah Halmahera Utara perlu secara intens menjalankan gagasan-gagasan baru dalam memberikan informasi, edukasi dan penegasan hukum yang berlaku terkait dengan pelanggaran-pelanggaran penyebaran hoax tersebut. Sikap Pemerintah Halmahera Utara, perlu secara tegas dalam melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku yang menyebarkan berita bohong atau hoax tersebut, tidak boleh pandang bulu, siapa saja ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adiprasetyo, *dkk*. 2017. *Hoax*, Reproduksi dan Persebaran: Suatu Penelusuran Literatur. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1 (4), Agustus: 271-278. http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/16409.

Ali, F dan Alam, A. S. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika Aditama.

Buluamang, Y. M. O dan Handika, L. P. 2018. Komunikasi Pemerintahan Antar Perangkat Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Jurnal Penelitian Komunikasi 21 (1), Juli: 57-72. http://bppkibandung.id/index.php/jpk.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Firmansyah, R. (2017). Web Klarifikasi Berita untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax. Jurnal Informatika, 4(2), 230–235.

Handoko, H. *Manajemen*. Edisi kedua. BPFE-Yogyakarta

Hasan, E. 2019. Paradigma Komunikasi Pemerintahan. Modul IPEM4319-M1. *http://repository.ut.ac.id.IPEM4319-M1*

Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Juditha, C. 2018. Interaksi Komunikasi *Hoax* di Media Sosial Serta Antisipasinya. Jurnal Pekommnas 3 (1) April, 31-44. <https://media.neliti.com/media/>

Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller, 2009. *Manajemen Pemasaran Jilid 1*, edisi ketiga belas, terjemahan Bob Sabran. Jakarta: Erlangga.

Kumparan Tech. Riset: 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet. 21 Februari 2020. Google.co./amp/s/m.kumparan

Makmur, H. 2009. *Teori Manajemen Stratejik Dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Maulana, L. (2017). Kitab Suci dan Hoax: Pandangan Alquran dalam Menyikapi Berita Bohong. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 2(2), 209–222. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1678>

Mulyana, D. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyana, D dan Rakhmat, J. 2006. *Komunikasi Antarbudaya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Munir, Fuady. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.

Pace, R. W Dan Faules, D. F. 2010. *Komunikasi Organisasi*. Penerjemah Deddy Mulyana. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 5(1), 58–70. https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342

Rihadi, D. R. 2017. Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang 5 (1). http:// jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk/article/view/1342.

Samovar, L. A, Porter, R. E, dan McDaniel E. R. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*. Penerjemah Indri Margaretha Sidabalok. Jakarta: Salemba Humanika

Sedarmayanti. 2018. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Silalahi, U. 2004. Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik 3 (1), 36–54. http:// journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/652

Silalahi, U. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.

Siswoko, K. H. (2017). Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau ‘Hoax.’ Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 1(1), 13–19.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada.

Sri Soemantri M. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutantohadi, A., & Wakhidah, R. (2018). Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat. DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.32486/jd.v1i1.153>

Syafiie, I. K. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANDRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

UI Lib. 2017. Stop *Hoax*. Berkala 3 (1):1-27. <http://lib.ui.ac.id/unduh/unduh/>

UILib\_Berkala\_Vol\_3\_No\_1.pdf

Usman, H. 2010. *Manajeman Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*. Edisi 3. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.

Widjaja, A. W. 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Widjaja, W.A. 2010. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Cetakan VI. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Witro, D. (2020). Urgency Rijalul Posting in Preventing Hoax: Quranic Perspective. Islamic Communication Journal, 5(1), 38–49. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/icj.202 0.5.1.5451